

# **Ekstraktivisme baru dalam penambangan timah di kabupaten bangka: studi kasus jaringan patronase kolektor timah = New extractivism on tin mining in bangka district: case study of tin collector patronage network**

Agung Nugraha, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20481222&lokasi=lokal>

---

## **Abstrak**

### **<b>ABSTRAK</b><br>**

Desentralisasi telah membuka kesempatan investor luar negeri memasukkan modalnya untuk mengembangkan sektor industri setalah adanya kesepakatan pasar bebas. Pengambilan kebijakan pembangunan ekonomi berbasis sumber daya alam oleh pemerintah daerah mendorong masyarakat untuk menambang secara bebas dan masif, yang diikuti dengan tata kelola pertambangan mineral timah yang buruk. Beberapa kajian industri ekstraksi terbagi dua perspektif, yaitu perspektif institusional dan perspektif ekonomi politik. Perspektif institusional lebih menekankan pada tata kelola sumber daya alam yang baik dan rente ekstraksi pada kelembagaan. Sedangkan, perspektif ekonomi politik menekankan kelas penguasa mengakses dan mengontrol sumber daya alam yang diikuti perilaku rente ekstraksi. Penelitian ini menggunakan perspektif ekonomi politik dari konsep Veltmeyer dan Petras tentang ekstraktivisme baru. Penelitian ini menjelaskan tentang penetrasi modal ekstraksi dalam penambangan timah dengan peran jaringan patronase kolektor timah dalam proses akumulasi kapital dan menjelaskan bentuk lainnya dari konflik sumber daya alam. Dengan mengacu studi kasus penelitian di Kabupaten Bangka terkait penambangan timah, peneliti berargumen ekstraktivisme baru dalam penambangan timah semakin berkembang dikarenakan adanya dukungan modal eksstraksi yang disebarluaskan oleh elit industri kepada jaringan kolektor timah, yang diikuti dengan konflik kepentingan terhadap penguasaan sumber daya mineral timah oleh elit industri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara mendalam, kajian literature dan data sekunder. Informan penelitian ini adalah kolektor timah, pengusaha timah dan smelter, pemilik dan penambang tambang inkonvensional, Walhi, Jatam, peneliti ahli dan ASN Kabupaten Bangka.

<hr>

### **<b>ABSTRACT</b><br>**

Decentralization has opened up the opportunities for foreign investors to devote their capital for developing industrial sector after the free market agreement. The adoption of natural resource-based economic development policies by local governments encourages people to mine freely and massively, that followed by poor mining management of ton minerals. A number of studies on extractive industries are categorized into two perspectives, namely institutional perspective, and political economy perspective. Institutional perspectives emphasizing on natural resource governance and the existence of rent in the institutional governance system. Meanwhile, the political economy

perspective tend to focus on how the ruling class accessing and controlling natural resources followed by the act of extraction rent. This study uses a political economy perspective from the Veltmeyer and Petras concepts of new extractivism. This study explains the capital penetration on tin mining with the role of the patronage network of tin collectors in the process of capital accumulation and explains the other forms of natural resource conflict. By using case studies in Bangka Regency related to tin mining, this study argues that new extractivism in tin mining is increasingly developing due to the support of extractive capital that is disseminated by the industrial elite to the tin collector network, followed by conflicts of interest over the control of tin mineral resources by industrial elite. This research uses qualitative case study method. Data collection techniques used observation, in-depth interviews, literature review, and secondary data. Informants of this study ranging from tin collectors, tin entrepreneurs and smelters, owners and miners of unconventional mines, Walhi Bangka Belitung, JATAM, expert researchers and Bangka Regency Civil State Apparatus.